



Optimalisasi Program Kalimasada Melalui Kegiatan “Jebol Anduk” Sebagai Upaya Masyarakat Tertib Adminduk Kelurahan Kebonsari

Evinda Fenny Wulandari

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17

Agustus 1945 Surabaya

Email: evndfny12@gmail.com

Muhammad Roisul Basyar

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17

Agustus 1945 Surabaya

Email: roisulbasyar@untang-sby.ac.id

Korespondensi penulis : evndfny12@gmail.com

Abstract. *Population administration is a series of activities related to population data. Every citizen is obliged to have population data and to report all important events that occur. The Kalimasada (Adminduk Conscious Community Environmental Area) programs is one of the programs initiated by the Surabaya City Government to address the problem of orderly administration of population administration in Surabaya. This type of research uses a qualitative approach with the observation method carried out to be able to identify obstacles to optimizing the Kalimasada program in Kebonsari Village. Based on the results of the discussion, it was found that there were several inhibiting factors that caused the community to be disorderly adminduk. Based on these problems, efforts were made in the form of the “Jebol Anduk” service or the adminduk ball pickup service by going directly to residents homes. The implementation of this efforts is expected to provide a solution to the problem of orderly administration of population in the Kebonsari Village*

Keyword : *Population Administration, Jebol Anduk, Kalimasada, Optimization*

Abstrak. Administrasi kependudukan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan data kependudukan. Setiap warga negara berkewajiban untuk memiliki data kependudukan dan melaporkan segala peristiwa penting yang terjadi. Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi masalah ketertiban administrasi kependudukan warga Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi yang dilakukan untuk dapat mengidentifikasi hambatan pada optimalisasi program Kalimasada di Kelurahan Kebonsari. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan masyarakat tidak tertib adminduk. Dari permasalahan tersebut kemudian dilakukan upaya

Received Maret 30, 2023; Revised April 12, 2023; Mei 29, 2023

* Evinda Fenny Wulandari, evndfny12@gmail.com

berupa pelayanan “Jebol Anduk” atau pelayanan Jemput Bola Adminduk dengan mendatangi langsung ke rumah warga. Pelaksanaan upaya ini diharapkan dapat memberikan solusi dari masalah ketertiban administrasi kependudukan di Kelurahan Kebonsari.

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Jebol Anduk, Kalimasada, Optimalisasi

PENDAHULUAN

Surabaya merupakan daerah kawasan kota dimana menjadi ibukota dari provinsi Jawa Timur dengan peringkat kedua sebagai kota terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta. Sebagai daerah kawasan ibukota dan kota terbesar di Indonesia, Surabaya memiliki jumlah populasi penduduk yang cukup besar. Perpadatan penduduk di kota Surabaya menduduki tingkat pertama di kawasan Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.987.863 jiwa. Luas dari kota Surabaya sendiri sebesar kurang lebih 33.451 Ha, yang terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di kota Surabaya setiap tahunnya, menyebabkan angka kepadatan penduduk juga terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini menimbulkan berbagai dampak yang signifikan untuk kota Surabaya, salah satunya adalah pada masalah administrasi kependudukan.

Masalah administrasi kependudukan yang timbul di kota Surabaya disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah tingginya tingkat kepadatan penduduknya. Hal ini, menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dibantu oleh institusi dan Dinas terkait yang terlibat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disdukcapil merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pengurusan pemerintah daerah yang berfokus pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam pelaksanaannya untuk mengatasi masalah kependudukan yang timbul, Disdukcapil dibantu dengan pihak-pihak terkait dan pelaksanaannya juga dimulai dari satuan instansi terkecil dalam kota yaitu kelurahan.

Pada sistem pemerintahan suatu negara, kelurahan/desa merupakan salah satu bagian dari struktur pemerintahan dengan tingkatan paling rendah. Kelurahan menangani masalah pemerintahan yang sangat mendasar karena berhubungan secara langsung dan dekat dengan masyarakat. Bidang kependudukan merupakan bagian yang ada dalam masyarakat karena menyangkut dengan data dan identitas dari seseorang. Kependudukan yang ada pada

masyarakat biasanya menyangkut pada hal-hal administratif yang melekat pada seseorang seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Pencatatan Peristiwa Penting, Akta Kematian, dan yang lain sebagainya. Administrasi kependudukan yang melekat pada diri seseorang merupakan salah satu hal yang penting bagi mereka untuk menjalankan kehidupan sebagai warga negara.

Namun pada pelaksanaannya, administrasi kependudukan ini sering kali diabaikan oleh masyarakat. Dalam praktik yang dilakukan, pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat kerap tidak berjalan dengan lancar dan timbul beberapa hambatan yang mengakibatkan masyarakat tidak tertib pada dokumen administrasi kependudukannya. Hambatan-hambatan yang sering kali timbul dan hadir di masyarakat diantaranya adalah proses pelayanan yang lambat, tenaga pelayanan yang kurang menguasai bidangnya, sistem yang kerap kali berubah, masyarakat yang kurang sadar dengan dokumen keperluannya, dan yang masih terjadi sampai saat ini adalah adanya pungutan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, masalah ketidaktertiban akan administrasi kependudukan ini semakin menjadi-jadi.

Dari beberapa masalah yang timbul di tengah masyarakat tersebut, Disdukcapil Kota Surabaya membuat beberapa inovasi yang ditujukan sebagai upaya penyelesaian. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik bahwa negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negaranya dalam rangka pemenuhan hak dan kewajibannya. Sebagai sarana untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya terutama pada Disdukcapil telah melakukan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan masyarakat Surabaya tertib adminduk melalui Program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) yang tanggung jawabnya diberikan kepada RT RW setempat untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menunjang inovasi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada menggunakan aplikasi berbasis website yang bisa di akses untuk mengajukan permohonan yaitu KNG (Klampid New Generation) dengan harapan lebih memudahkan masyarakat karena tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil maupun kelurahan untuk mengurus data administrasi Kependudukan. Namun, inovasi pelayanan

digital yang yang seharusnya lebih memudahkan masyarakat ini juga tidak serta merta menjadi solusi terkait dengan ketidaktertiban masyarakat.

Budaya masyarakat yang tidak peka dengan perubahan teknologi kemudian menjadi hambatan dari pelaksanaan inovasi yang telah dilakukan. Dari beberapa permasalahan yang timbul tersebut, Penulis sebagai peserta magang Disdukcapil Kota Surabaya diharapkan mampu membantu optimalisasi program Kalimasada yang disediakan pemkot dengan melaksanakan prosedur pelayanan kepada masyarakat tidak hanya melalui KNG tetapi juga secara door to door ke rumah masyarakat Kelurahan Kebonsari. Hal ini dilaksanakan dengan harapan masyarakat akan lebih tertib terkait data adminduk dan mahasiswa juga dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama di bangku kuliahnya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan magang yang dilaksanakan dalam pengabdian pada Kelurahan Kebonsari adalah kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar (2013:10), metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menemukan ilmu pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada waktu tertentu. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan partisipasi aktif, observasi, dan wawancara. Metode partisipasi aktif dilaksanakan dengan terjun lapangan secara langsung untuk mengumpulkan dan melakukan survey terkait data kalimasada warga, selain itu bentuk metode partisipasi aktif yang lain adalah pelayanan secara door to door ke rumah warga. Metode observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung proses kerja yang dilaksanakan oleh pegawai Kelurahan setempat dalam melaksanakan pelayanan kepada warga, selain itu metode ini juga digunakan untuk mengamati masalah administrasi kependudukan apa saja yang dialami warga seperti pindah luar kota, data yang tidak diketahui, penyandang disabilitas dan lansia yang di dampingi oleh pegawai setempat. Selain kedua metode tersebut, mahasiswa juga dapat melakukan metode wawancara untuk mendapatkan informasi kebenaran data warga sebelum melakukan pengajuan melalui aplikasi KNG.

HASIL PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2013 bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk

melengkapi data kependudukannya dan melaporkan setiap peristiwa penting yang terjadi seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan yang lain sebagainya. Pemerintah Kota Surabaya melalui program Kalimasada ini membantu masyarakat untuk mempermudah kepengurusan dokumen adminduknya. Untuk menunjang keberhasilan program Kalimasada, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan kemajuan teknologi melalui aplikasi KNG untuk mempermudah sistem layanan adminduk dimana pada aplikasi ini warga dapat mengajukan permohonan perubahan adminduk secara mandiri atau dibantu oleh pegawai kelurahan.

Kegiatan praktik kerja lapangan atau yang biasa disebut dengan magang merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah magang sekaligus sebagai salah satu syarat kelulusan. Implementasi kegiatan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa kegiatan observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik yang ada di lingkungan masyarakat secara langsung untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dan menjadi fokus utama untuk mengoptimalkan program kalimasada yang di telah di rintis oleh pemerintah sebagai inovasi pelayanan publik. Adanya program kalimasada ini sekaligus bertujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar Kelurahan Kebonsari dalam mengurus data administrasi Kependudukannya dengan maksud agar terciptanya masyarakat yang tertib adminduk.

Namun pada pelaksanaannya, program Kalimasada di Kelurahan Kebonsari masih belum bisa dikatakan berjalan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kebonsari masih banyak sekali ditemui warga masyarakat yang belum tertib dokumen administrasi kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Kebonsari dalam memperbarui dokumen kependudukannya. Masyarakat cenderung akan memperbarui dokumennya di saat-saat yang dibutuhkan saja. Oleh karena itu, pelaksanaan program kalimasada di Kelurahan Kebonsari masih di rasa belum optimal meskipun saat ini pelayanan administrasi kependudukan sudah dilakukan lebih dekat dengan warga melalui Pelayanan di Balai RW setempat.

Berdasarkan persentase pada laman akun kalimasada kelurahan, masih terdapat banyak sekali data warga yang diketahui belum melakukan pembaharuan yang diantaranya adalah data belum memiliki akta kelahiran, data belum memiliki KIA, data belum rekam KTP, dan belum kawin tercatat, data diduga meninggal, dan yang lain sebagainya. Peran RT

Optimalisasi Program Kalimasada Melalui Kegiatan “Jebol Anduk” Sebagai Upaya Masyarakat Tertib Adminduk Kelurahan Kebonsari

rintisan pada program kalimasada yang dirintis untuk membantu masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukannya dirasa belum cukup efektif untuk dapat mendorong masyarakat tertib adminduk.

NO RW	BELUM REKAM			BELUM KIA			BELUM AKTA LAHIR			DIDUGA MENINGGAL			BELUM KAWIN TERCATAT		
	SEMULA	PROGRESS	%	SEMULA	PROGRESS	%	SEMULA	PROGRESS	%	SEMULA	PROGRESS	%	SEMULA	PROGRESS	%
	0	0	NAN	0	0	NAN	0	0	NAN	0	0	NAN	0	0	NAN
1	60	3	5	605	57	9.42	15	6	40	41	29	70.73	387	89	23
2	67	0	0	590	3	0.51	17	0	0	41	23	56.1	262	20	7.63
3	53	0	0	358	7	1.96	23	0	0	22	14	63.64	227	22	9.69
TOTAL	180	3	1.67	1553	67	4.31	55	6	10.91	104	66	63.46	876	131	14.95

Gambar 1. Persentase Data Kalimasada Kelurahan Kebonsari

Sumber : <https://kalimasada.disdukcapilsurabaya.id/login/index.php>

Pemerintah Kota Surabaya melalui Kelurahan telah memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mengurus dan memperbarui dokumen administrasi kependudukannya sendiri melalui pengajuan mandiri KNG, pelayanan di Balai RW, hingga pelayanan malam sayang warga. Namun sayangnya, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan data administrasi kependudukan memang masih sangat rendah. Selain dari minimnya tingkat kesadaran, masyarakat di daerah Kelurahan Kebonsari juga banyak tidak berdomisili sesuai dengan KK di Kelurahan Kebonsari. Sehingga hal ini menjadi kendala dari berjalannya program kalimasada di RW RW setempat.



Gambar 2 Pelayanan Administrasi Kependudukan di Balai RW Kelurahan Kebonsari

Kurang optimalnya pelaksanaan program kalimasada ini bukan semata karena warga masyarakat yang kurang sadar tetapi juga dikarenakan oleh beberapa faktor lainnya diantaranya adalah kurangnya pemahaman RT RW sekitar terkait dengan data kalimsada

yang ada sehingga informasi data tersebut tidak sampai kepada warga secara berkala. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait dengan kalimasada yang dilakukan juga menjadi salah satu alasan tidak optimalnya program kalimasada yang seharusnya ditunjukkan untuk membantu warga dalam tertib adminduk.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi dari program kalimasada yang sudah dirintis oleh pemerintah Kota Surabaya, Petugas Kelurahan dan juga mahasiswa magang yang ditempatkan di Kelurahan Kebonsari kemudian meningkatkan kegiatan pelayanan “Jebol Anduk” di wilayah Kelurahan Kebonsari. Yang dimaksud dengan kegiatan JEBOL ANDUK adalah Jemput Bola Administrasi Kependudukan dimana, petugas kelurahan setempat melakukan pelayanan dengan turun lapangan secara langsung ke rumah warga (Pelayanan secara Door To Door). Dimana pelayanan ini dimaksudkan untuk keperluan survey data warga yang namanya tercantum pada data update kalimasada. Pelaksanaan pelayanan ini biasanya dibantu oleh Ketua RT dan juga para KSH setempat

Pelayanan Jebol Anduk ini memberikan dampak yang cukup positif untuk dapat dijadikan sebagai upaya megoptimalisasikan program kalimasada karena dengan di datangi secara langsung, warga merasa lebih terbantu. Dengan pelayanan “Jebol Anduk” juga, warga dapat mengajukan perubahan untuk dokumen administrasi kependudukannya sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak tertib administrasi kependudukan karena tidak ada waktu, lupa, dan yang lainnya. Implementasi dari pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan ini dinilai sangat memudahkan warga terutama bagi para lansia dan warga disabilitas yang mungkin tidak dapat datang ke kelurahan maupun balai RW dan juga tidak bisa menggunakan teknologi.



Gambar 3 Pelaksanaan "Jebol Anduk" ke Rumah Warga Melalui RT Setempat

Selain implementasi Jebol Anduk yang mulai di galakkan, RT RW setempat juga membantu peningkatan program kalimasada ini dengan memberikan informasi secara berkala kepada warga masyarakatnya melalui grup warga dan mengarahkan warga untuk segera mengurus dan memperbarui dokumen administrasi kependudukannya di Balai RW terdekat. Penertiban dokumen administrasi kependudukan oleh RT RW dilakukan terutama untuk data warga yang namanya tercantum namun tidak berdomisili di tempat maka akan segera diajukan blokir guna mengurangi beban kalimasada.

Dengan adanya inovasi pelayanan Jebol Anduk dan kebijakan tegas kepada warga ini diharapkan akan mampu meningkatkan program Kalimasada yang ada untuk menuju masyarakat Surabaya Tertib Administrasi Kependudukan terutama ada Kelurahan Kebonsari. Sehingga, dengan bertambah optimalnya program kalimasada diharapkan akan memberikan dampak yang efektif juga bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan dilapangan terkait dengan optimalisasi program Kalimasada di Kelurahan Kebonsari untuk menuju masyarakat Surabaya Tertib Administrasi Kependudukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Kelurahan Kebonsari yang dibantu oleh Petugas Kelurahan dan mahasiswa magang MSIB telah melaksanakan program Kalimasada. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang disebabkan oleh kurang sadarnya warga masyarakat akan pentingnya data administrasi kependudukan serta masih kurangnya pemahaman terkait dengan kalimasada yang disampaikan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan program Kalimasada, Kelurahan Kebonsari telah melakukan inovasi pelayanan berupa kegiatan “Jebol Anduk” atau Jemput Bola Administrasi Kependudukan dimana pelayanan ini dilaksanakan secara door to door ke rumah warga setempat untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada warga dalam mengurus dan memperbarui dokumen administrasi kependudukannya. Selain itu, RT RW setempat juga turut membantu dengan memberikan kebijakan tegas terkait dengan warga yang tidak diketahui keberadaannya sudaaya diajukan blokir sehingga memberikan peringatan kepada masyarakat.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Jebol Anduk ini diharapkan akan memberikan perubahan yang signifikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan sehingga tercipta masyarakat Surabaya yang tertib adminduk. Untuk selanjutnya, kegiatan seperti ini harus lebih di galakkan lagi sehingga program Kalimasada yang memang sudah tepat dilaksanakan lebih optimal lagi implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- bpk. go. id. 2006. *Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202> . Diakses pada 18 Mei 2023
- bpk. go. id. 2013. *Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013> . Diakses pada 18 Mei 2023
- bpk. go. id. 2006. *Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009> . Diakses pada 18 Mei 2023
- Diah Putri, Rosyidah R. 2023. *Optimalisasi Kalimasada dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Gayungan Kota Surabaya*. Community Development Journal Vol. 4 No. 1.
- Nanda, Setia. 2022. *Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Dengan Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid di Kelurahan Nginden Jangkungan*. Community Development Journal Vol. 3 No. 2. Hal 1113.